

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menyatakan bahwa setiap laporan keuangan yang disusun merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap. Laporan keuangan lengkap biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan catatan laporan lainnya serta bahan penjelasan, yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Semua laporan keuangan ini adalah catatan informasi keuangan perusahaan atau entitas tertentu dalam periode akuntansi tertentu, dan biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menggambarkan kinerja entitas atau perusahaan tersebut.

“Laporan keuangan adalah laporan terstruktur atas status keuangan dan transaksi entitas pelapor” (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Pada instansi pemerintah perlu dibuat laporan keuangan eksternal, antara lain laporan keuangan formal seperti laporan surplus dan defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca dan kinerja, yang dinyatakan dalam indikator keuangan dan non keuangan. Menurut Rahmadani (2015), tujuan umum laporan keuangan (terutama laporan keuangan pemerintah daerah) adalah untuk memberikan informasi tentang status keuangan entitas, realisasi anggaran dan kinerja selama proses pelaporan untuk digunakan semua pengguna untuk mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya.

2.1.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jika laporan keuangan memiliki nilai informasi yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan dapat dikatakan berguna bagi pemakainya. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya memiliki standar tersendiri. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan tahun 2010, jika laporan keuangan pemerintah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, maka dapat dikatakan berkualitas tinggi.

Dalam penelitian Rahmadhani (2015) mengatakan “bahwa semua karakteristik tersebut merupakan salah satu prasyarat normatif yang diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas”, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna ataupun manajerial. Informasi tersebut juga digunakan untuk membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa yang akan datang. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat digunakan dengan maksud dari pengguna.

2. Andal

Keandalan suatu informasi dalam laporan keuangan artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan yang material. Fakta dalam informasi harus disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. Dapat dipahami

Suatu informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila informasi yang disajikan mudah untuk dipahami pengguna laporan keuangan. Informasi yang disajikan dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dan pengetahuan pengguna.

4. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dalam laporan keuangan dikatakan bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara internal maupun secara eksternal. Perbandingan dengan cara internal dapat dilakukan bila suatu entitas dari tahun ke tahun menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Sedangkan

perbandingan secara eksternal dilakukan dengan cara membandingkan rasio-rasio perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan.

Apabila informasi yang diberikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menghasilkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan standar nilai informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat mengakibatkan kerugian daerah yang sangat besar, pengelolaan administrasi yang lemah, pemborosan yang besar, waktu yang tidak efisien dan efektif.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia merupakan suatu acuan dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas karena seseorang yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut Indriasih (2014) “Sumber Daya Manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya”. Suatu sistem yang baik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.

Menurut Yendrawati (2013) “Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu system untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau wewenangnya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien”. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk mencapai kinerja serta untuk menghasilkan suatu keluaran baru (output) dan hasil-hasil yang diperoleh (outcomes)

Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki suatu kemampuan khusus, keterampilan, pengetahuan, dan memiliki suatu tanggung jawab. Menurut beberapa ahli yang mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak memiliki pengetahuan dan perilaku baik maka dalam pekerjaannya akan terhambat dan mengakibatkan adanya pemborosan baik dari segi waktu, uang, dan tenaga. Sedangkan menurut Hutapea (2008) mengatakan bahwa ada tiga buah komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang tertentu. Informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam kondisi nyata. Berhasil atau tidaknya sebuah tugas akan dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai. Maka dari itu pegawai yang memiliki pengetahuan cukup baik akan lebih meningkatkan efisiensi kerja dalam melaksanakan tugasnya.

2. Keterampilan

Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan sama dengan memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. Didalam melaksanakan tugasnya, selain memiliki pengetahuan cukup, pegawai juga perlu memiliki keterampilan khusus. Keterampilan ini diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini diperlukan saat berkomunikasi, memotivasi orang lain, maupun dalam menjalankan tugasnya agar terlaksana dengan mudah dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau sebuah instansi.

3. Perilaku / Sikap

Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Pegawai diharapkan memiliki sikap yang mendukung tujuan sebuah organisasi dalam perusahaan. Apabila pegawai sudah memiliki sikap tersebut maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pegawai akan merasa memiliki tanggung jawab penuh atas tugas yang telah diberikan.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dengan berkembangnya waktu, perkembangan teknologi berubah setiap hari. Teknologi informasi (TI) berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Penggunaan teknologi informasi adalah proses pengolahan dan pendistribusian data melalui penggunaan komputer dan perangkat telekomunikasi untuk aktivitas manusia. Teknologi informasi Indonesia juga telah berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia modern. “Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, teknologi penyimpanan data dan teknologi komunikasi” (Laundon, 2006: 174)

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar.

Menurut pengantar Setyowati, Isthika dan Pratiwi (2016), penggunaan teknologi informasi akan sangat mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyediaan laporan keuangan, dan menghindari pengeposan dokumen dalam buku rekening, jurnal, dan buku besar untuk melengkapi laporan keuangan. Kesalahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Komarasari (2016) meningkatkan kinerja organisasi / lembaga pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan e-government sangat penting dalam pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010) untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen perlu adanya suatu koordinasi system pengendalian internal yang meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran data tersebut.

Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh penerapan sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, proses ini digunakan untuk membantu organisasi mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan dipandu oleh sistem pengendalian internal organisasi.

Adapun unsur-unsur Pengendalian Internal Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengacu pada unsur SPI yang telah di praktikan pada lingkungan pemerintah di berbagai Negara yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Menurut PP No 60 tahun 2008 Pasal 4 seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang memiliki perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakkan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompeten
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya pemerintah
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif, dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Menurut PP No 60 tahun 2008 Pasal 13, seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang ada. Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Identifikasi resiko, dan
- b. Analisis resiko

Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

- a. Tujuan Instansi Pemerintah, dan
- b. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pengendalian

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 18 ayat (1), seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PP Nomor 60 tahun 2008:

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan system informasi
- d. Pengendalian fisik atas asset
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 41 dan Pasal 42, seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib melakukan identifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan semua informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
- b. Mengelola mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 pasal 43, Pimpinan Instansi wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.2 Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, berikut adalah pengertian dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi:

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya. Konsolidasi yang dimaksud oleh pernyataan standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan mengeliminasi

akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya. Dalam catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas akuntansi atau entitas pelaporan.

Dalam prakteknya, LKPD disusun terdiri dari 3 hal, yaitu:

1. Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPD selaku Entitas Pelaporan
2. Laporan Keuangan yang disusun oleh PPKD selaku Entitas Akuntansi
3. Laporan Keuangan Konsolidasian/Gabungan yang mencerminkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara utuh.

Yang perlu disiapkan oleh SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD
2. Neraca SKPD
3. Laporan Operasional (LO) SKPD
4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD

Tahapan-tahapan untuk masuk ke tahapan finalisasi Konsolidasian Laporan Keuangan:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini bukan masuk dalam pelaksanaan finalisasi laporan keuangan, namun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses Konsolidasian Penyusunan Laporan Keuangan ini.

- Diawali dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun yang didalamnya berisi petunjuk penyusunan kelengkapan dokumen dan laporan keuangan SKPD.
- Melakukan Desk awal atas laporan keuangan SKPD yang telah masuk ke BPPKAD sebagai entitas pelaporan. Desk ini memastikan data awal yang dapat disajikan OPD telah sesuai atau belum, sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang timbul setelah tutup buku.

- Desk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menghitung kesesuaian nilai kas daerah dengan realisasi penerimaan dan realisasi belanja. Memastikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terkait pengelolaan kas.
 - Rekonsiliasi dana BOS
 - Rekonsiliasi Lanjutan data akuntansi mencakup piutang, persediaan, investasi dan kewajiban
 - Desk kedua atas piutang dan persediaan
 - Desk akun kewajiban (utang jangka pendek, utang beban, pendapatan dibayar dimuka, utang jangka panjang)
 - Rekonsiliasi data asset tetap berwujud dan tidak berwujud
 - Koordinasi penyelesaian temuan BPK atas LKPD tahun sebelumnya
 - Desk laporan Operasional (LO) dan Neraca
 - Desk Laporan Perubahan Ekuitas
 - Desk Analisis laporan keuangan SKPD
 - Penyusunan draf Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD
 - Pembekalan persiapan pelaksanaan konsolidasi Laporan SKPD
 - Tahapan penyampaian laporan keuangan SKPD
2. Tahap Finalisasi
- Kesesuaian laporan keuangan mencakup LRA, Neraca, LO, dan LPE disandingkan dengan analisis data keuangan
 - Pemenuhan data piutang, persediaan dan asset tetap, khususnya terkait migrasi dan nilai penyusutan serta utang
 - Uji kelengkapan dokumen tentang pengiriman Laporan Keuangan
3. Tahap Review, dilakukan pada Laporan Keuangan SKPD yang telah difinalisasi oleh Inspektorat.

Adapun hasil keluaran/output yang diharapkan dari kegiatan Konsolidasian Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ini adalah:

1. Data Laporan Keuangan SKPD yang valid (dapat dibandingkan) sehingga mempermudah dilakukannya proses konsolidasian laporan SKPD dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

2. Tersedianya data pendukung laporan keuangan sehingga mempermudah penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten
3. Tersedianya Laporan Keuangan SKPD yang telah valid dan direview oleh Inspektorat
4. Pemetaan permasalahan yang harus dilakukan dalam penyusunan LKPD

2.3 Penelitian terdahulu

Yendrawati (2013) melakukan penelitian dengan variabel dependen kualitas informasi keuangan, sedangkan variable independennya yaitu sistem pengendalian internal dan kapasitas sumber daya manusia serta faktor eksternal sebagai variabel moderating. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, yang ditujukan kepada semua pengelola keuangan pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan variabel faktor eksternal dapat memoderasi pengaruh dari sistem pengendalian internal tersebut. Sedangkan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, akan tetapi faktor eksternal tidak dapat memoderasi pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2015) menggunakan sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data mentah dengan menyebarkan kuisisioner kepada pegawai terkait penyusunan laporan keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kapabilitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengaruh variabel dependen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Komarasari (2016) menggunakan variabel independen kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian akuntansi internal dalam

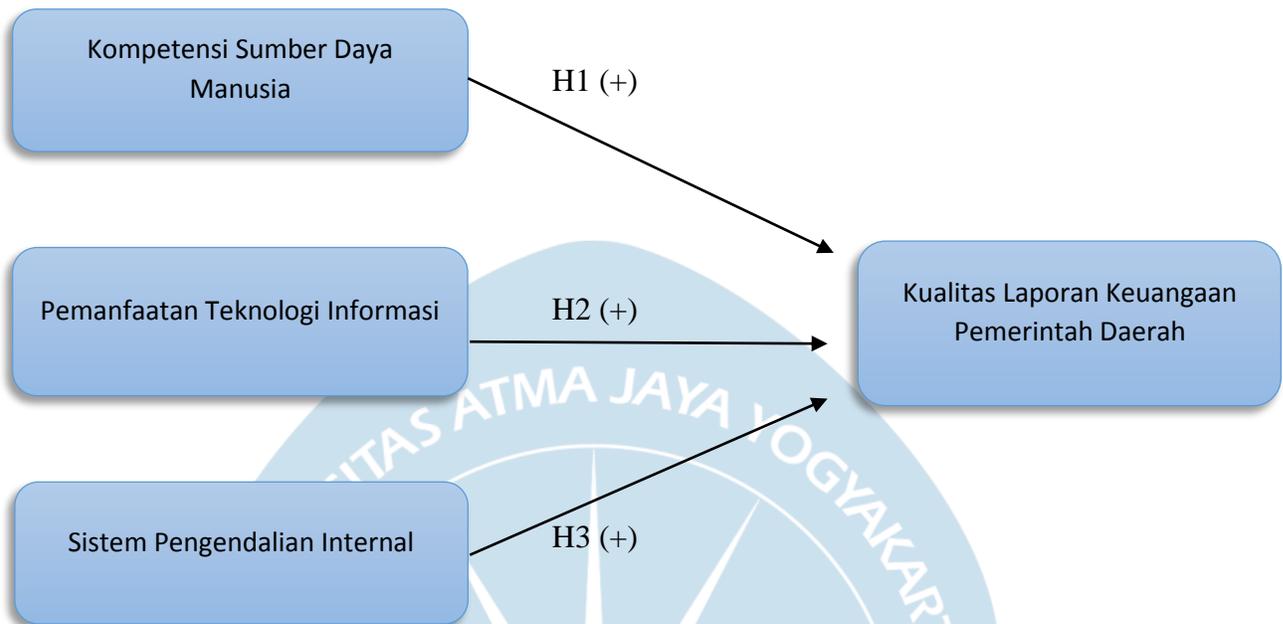
penelitiannya untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan variabel dependennya adalah keandalan pelaporan keuangan daerah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPD) Bantul, pimpinan survei dan staf Bagian Akuntansi Keuangan melakukan survei kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan teknologi informasi dan pengendalian akuntansi internal berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapabilitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan.

Kemudian dalam penelitian Yuliani dan Agustini (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai SKPD Kabupaten Bandung yang bekerja dibidang akuntansi/keuangan. Metode statistik yang gunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mahaputra dan Putra (2014) melakukan penelitian dengan variabel dependen kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan, standar akuntansi pemerintahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi SKPD kabupaten Gianyar dan gambaran umum Kabupaten Gianyar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi nonpartisipan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independennya yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran



Hubungan antara Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja setiap karyawan di suatu perusahaan atau instansi. Setiap karyawan harus memiliki pengetahuan yang cukup, keahlian khusus dan sikap yang baik saat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan adanya karakteristik tersebut maka tugas yang dilakukan akan lebih efisien dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

Dalam PP No 12 tahun 2019 membawa perubahan sangat besar dan memberikan suatu pendekatan baru dalam prosesnya institusi dalam melakukan pengelolaan dan penyusunan keuangan daerah. Perubahan yang sudah melekat dan tertanam dalam PP No 12 tahun 2019 adalah terkait dengan perubahan dalam suatu sistem pembuatan anggaran, baik proses dalam pembuatan anggaran maupun bentuk dan struktur APBD yang telah dibuat. Perubahan yang telah terjadi merupakan suatu perubahan yang bersifat secara paradigmatik, sedangkan perubahan yang bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri No 29 tahun 2002, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah.

Yendrawati (2013) menyatakan bahwa variabel kapaasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus suatu kapasitas sumber daya manusia yang ada dalam sebuah institusi, maka kualitas informasi laporan keuangan juga semakin bagus.

Menurut penelitian Yuliani dan Agustini (2016) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sub-bagian pengelolaan keuangan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis dimaksudkan untuk meneliti kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ha: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pelaksanaan proses pembangunan harus ditindaklanjuti sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah juga harus menyampaikan informasi keuangan daerah kepada layanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang terus berkembang untuk meningkatkan kinerja setiap pegawai, dan membangun jaringan sistem informasi manajemen untuk mempermudah akses antar unit kerja.

Menurut penelitian yang dilakukan Yuliani dan Agustini (2016) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sub-bagian akuntansi atau keuangan telah melakukan pengelolaan data transaksi keuangan dengan menggunakan software yang sesuai dengan perundang-undangan. Laporan yang dihasilkan berasal dari sistem informasi yang telah terintegrasi, dengan adanya jadwal pemeliharaan secara teratur atau peralatan yang rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Setyowati, Isthika, Pratiwi (2016) menyatakan pemanfaatan sistem informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ha: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi kinerja sumber daya manusia suatu organisasi serta sangat berperan penting dalam pencegahan dan mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*). Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan suatu keyakinan yang mencukupi dengan sebuah pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dan keterandalan

laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun sektor publik seperti organisasi pemerintah. Rahmadani (2015) menyatakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin baiknya pengendalian internal maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Dalam penelitian Yendrawati (2013) menyatakan bahwa variable sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan tidak terbukti. Walaupun sistem pengendalian internal yang telah diterapkan sudah bagus, tetapi pemerintah daerah belum menetapkan sistem pengendalian internal secara efektif, hal ini menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kembali hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ha: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah